



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 ✦ informasi@pajak.go.id ✦
pengaduan@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE	: BPE-42796/CT/KPP.1504/2026
Tanggal	: 26 Februari 2026
NPWP	: 7322060811830003
Nama Wajib Pajak	: MANSUR HASANENG,S.HI
Jenis SPT	: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun Pajak	: 2025
Masa Pajak	: Januari - Desember 2025
Status SPT	: Normal
Saluran	: Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	: 26 Februari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP. SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.

Mohon simpan email ini sebagai arsip pribadi Anda.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN YANG MENERIMA
UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA

BPA1

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	PERIODE PENGHASILAN	SIFAT PEMOTONGAN	STATUS BUKTI PEMOTONGAN
BPA100001	01-2025 - 12-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NIK/NPWP : 7322060811830003
A.2 Nama : MANSUR HASANENG, S.H.I.
A.3 Alamat : Belopa
A.4 Jenis Kelamin : PRIA
A.5 Status PTKP : K/1
A.6 Posisi : STAF
A.7 Pegawai Asing : Tidak
A.8 Nomor Paspor :
A.9 Kode Negara : IDN
A.10 Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi : Tidak
A.11 Kerja

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

B.1.1 Kode Objek Pajak : 21-100-01
B.1.2 Objek Pajak : Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap
B.2 Jenis Pemotongan : Setahun Penuh

NO B.3	URAIAN B.4	JUMLAH (Rp) B.5
I PENGHASILAN BRUTO		
1.	Gaji/Pensiun atau THT/JHT	14,352,128
2.	Tunjangan PPh	0
3.	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan Sebagainya	21,113,432
4.	Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya	0
5.	Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja	0
6.	Penerimaan Dalam bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21	0
7.	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR	0
8.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d. 7)	35,465,560
II PENGURANG PENGHASILAN BRUTO		
9.	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun	1,773,278
10.	Iuran terkait Pensiun atau Hari Tua	0
11.	Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja	0
12.	Jumlah Pengurangan (10 s.d. 11)	1,773,278
III PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
13.	Jumlah Penghasilan Neto (9 - 13)	33,692,282
14.	Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya	0
15.	Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun / Disetahunkan)	33,692,282
16.	Penghasilan Tidak Kena Pajak	63,000,000
17.	Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan (15 - 16)	0
18.	PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan	0
19.	PPh Pasal 21 Terutang	0
20.	PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya	0
21.	PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)	0
22.	PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong	0
23.	PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (22 - 23)	0

B.6. JENIS FASILITAS PADA MASA PAJAK DESEMBER/MASA PAJAK TERAKHIR

Tanpa Fasilitas

C. IDENTITAS PEMOTONG PPh

C.1 NPWP : 0001138916803000
C.2 NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi : 0001138916803000000000 - Pengadilan Agama Belopa
C.3 Nama Pemotong : Pengadilan Agama Belopa
C.4 Tanggal : 31 Desember 2025
C.5 Nama Penandatanganan : Eko Priyatno
C.6 Pernyataan : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan ini telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah.



Disandatangani secara elektronik